

LOK.PPM.13

L O K A K A R Y A

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN  
EVALUASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) IPB  
BOGOR, 21-22 DESEMBER 1988

PERSEPSI FAKULTAS KEHUTANAN IPB TERHADAP  
PROGRAM DAN ORGANISASI PELAKSANAAN KKN IPB

Oleh

IDING M. PADLINURJAJI

PENYELENGGARA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1988

PERSEPSI FAKULTAS KEHUTANAN IPB TERHADAP  
PROGRAM DAN ORGANISASI PELAKSANAAN KKN IPB 1)

Oleh

IDING M PADLINURJAJI 2)

PENDAHULUAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa di Perguruan tinggi, khususnya di Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melembaga dan bahkan telah menjadi kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa S<sub>1</sub> IPB dalam menyelesaikan studinya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya sudah banyak mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan kebutuhan tertentu, sehingga beberapa tahun terakhir ini di IPB diterapkan apa yang disebut "*KKN profesi*".

Pelaksanaan KKN profesi ini hampir setiap saat menjelang dilaksanakan mengundang pro dan kontra di antara pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya antar pihak pengelola ditingkat pusat dengan pengelola pada beberapa jurusan tertentu, dan antara kurikulum jurusan/fakultas tertentu dengan program KKN secara umum.

---

1) Disampaikan pada "Lokakarya Pengembangan Program Pengabdian Pada Masyarakat dan Evaluasi KKN IPB, tanggal 21-22 Desember 1988, di LPPM IPB Bogor.

2) Pembantu Dekan I, Fakultas Kehutanan IPB.

**BEBERAPA PERMASALAHAN YANG PERLU DIPERHATIKAN  
DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KKN MENDATANG**

Setiap perguruan tinggi ditunjuk untuk melaksanakan dharma yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang dalam penerapannya dapat dilakukan oleh staf pengajar dan mahasiswa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang paling melembaga di IPB dilaksanakan tiap tahun secara serentak oleh mahasiswa tingkat 4. Karena perbedaan kebutuhan di antara jurusan di IPB maka beberapa tahun belakangan programnya lebih mengarah pada masing-masing profesi mahasiswa.

Untuk mendapat pegangan yang kuat bagi tiap jurusan/fakultas dan tidak setiap saat mengundang pandangan pro dan kontra, maka seyogyanya IPB membuat suatu rumusan yang jelas dalam rangka pengembangan KKN di masa datang dengan memperhatikan berbagai hal antara lain berikut:

1. Masyarakat selalu menuntut peningkatan kualitas sarjana yang dihasilkan dalam artian tidak menghasilkan sarjana yang tahu teori saja. Untuk menjawab tuntutan tersebut mau tidak mau mahasiswa harus secara terprogram dikirim ke lapangan atau objek yang langsung berkaitan dengan profesinya yaitu kegiatan kehutanan atau ke industri. Namun untuk melaksanakan tujuan tersebut sering dialami banyak hambatan, seperti keterbatasan waktu studi, kelang

kaan objek yang dapat mendukung, serta keterbatasan dana pendidikan dan keuangan mahasiswa.

2. Waktu studi mahasiswa yang hanya 8 semester dengan maksimum 148 SKS (satuan kredit semester) nampaknya mustahil mahasiswa (kehutanan) dapat melaksanakan KKN murni selama dua bulan dan juga melakukan praktek dalam profesinya dalam periode terpisah. Kalau hal demikian dilaksanakan, maka beban studi mahasiswa akan sangat berat dan hampir mustahil ada mahasiswa kehutanan yang lulus dalam waktu 9 semester (4,5 tahun). Padahal Fakultas/Perguruan Tinggi dituntut agar meluluskan mahasiswa dalam waktu yang tepat agar dapat menampung lebih banyak calon mahasiswa baru.
3. Makin berubahnya kurikulum jurusan ke arah spesialisasi menyebabkan sulitnya diterapkan pola KKN secara interdisipliner, dimana satu lokasi KKN diisi oleh wakil dari seluruh mahasiswa jurusan.
4. Keterbatasan dana yang tersedia. Padahal waktu yang lalu dana KKN disediakan seluruhnya oleh dana DIP (dana pembangunan). Dengan berkurangnya kemampuan keuangan pemerintah, maka beberapa tahun terakhir biaya KKN hampir seluruhnya ditanggung mahasiswa. Menurut pengamatan kami, hal ini ternyata merupakan beban yang sangat berat bagi sebagian besar mahasiswa IPB (khususnya mahasiswa kehutanan). Hal ini diperberat lagi dengan naiknya sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) di IPB tiga tahun terakhir ini.

5. Kemungkinan diterapkannya sistem SKS penuh di IPB yang sedikit banyak akan mempengaruhi sistem serta pola pelaksanaan pendidikan masing-masing jurusan atau program studi.

#### ALTERNATIF PEMECAHAN

Memperhatikan berbagai permasalahan tersebut di atas, ada beberapa alternatif yang dapat dipilih dalam rangka pelaksanaan KKN IPB di masa datang, yaitu:

1. Pelaksanaan KKN lebih diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas sarjana sehingga lebih kearah pelatihan profesi. Obyek KKN disesuaikan dengan kepentingan program pendidikan keprofesian. Kegiatan pengabdian diupayakan dilaksanakan pada masyarakat yang menjadi obyek pelatihan profesi atau masyarakat di sekitarnya. Pelaksanaan KKN demikian tidak perlu menambah waktu studi mahasiswa (tetap 4 tahun). Demikian juga biaya yang diperlukan terbatas pada dana koordinasi (termasuk persiapan) dan dana supervisi. Untuk jurusan tertentu KKN seperti ini masih dapat dikaitkan dengan kegiatan pengabdian karena terkait dengan kegiatan masyarakat petani di desa.
2. KKN murni sebagaimana tertulis pada buku pedoman KKN dapat saja dilaksanakan secara murni dengan beberapa persyaratan berikut:

- a. Masa studi secara resmi ditambah menjadi 9 atau 10 semester demikian juga SKS-nya sehingga beban studi mahasiswa tidak terlalu berat.
  - b. Program KKN perlu disusun secara jelas oleh IPB bersama-sama dengan daerah. Pengalaman yang lalu mahasiswa sering dihadapkan kepada suatu program yang tidak jelas di lokasi. Sering terjadi perbedaan pemahaman KKN antara mahasiswa dengan aparat pemda setempat, atau dengan pemuka masyarakat. Misalnya ada aparat desa yang terlalu membebani mahasiswa dalam soal dana untuk melaksanakan kegiatan.
  - c. Agar beban mahasiswa tidak terlalu berat maka seluruh biaya KKN ditanggung sepenuhnya oleh Pemda penerima termasuk biaya hidup mahasiswa selama di desa.
3. Kegiatan KKN ditawarkan kepada mahasiswa sebagai program pilihan baik dengan imbalan SKS maupun tidak (betul-betul pengabdian). KKN seperti ini dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi tertentu yang betul-betul ada kegiatan yang perlu mendapat bantuan mahasiswa, misal ada proyek percontohan tertentu. Jadi mahasiswa tidak meraba-raba kegiatan apa yang bisa dilaksanakan sebagai obyek kegiatan KKN. KKN seperti ini akan jauh lebih bermanfaat dari pada KKN murni yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa padahal programnya tidak jelas sehingga terjadi pemborosan waktu, biaya dan mungkin juga mengundang permasalahan.

## KESIMPULAN

Apabila KKN masih tetap akan dijalankan di masa akan datang, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan tuntutan berbagai pihak, serta melihat kepentingan mahasiswa sebagai subyek dan obyek KKN. Program perlu diperjelas demikian juga sarana berupa dana kiranya tidak sampai membuat beban mahasiswa bertambah.